

Analisis Peran Dinas Sosial Terkait Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang

Ageung Putri Aprilia¹, Hilda Rahmawati², Jaka Maulana³

^{1,2,3} Universitas Pamulang PSDKU Serang, Indonesia

Received : 23 Juni 2025, Revised : 26 Juni 2025, Published : 2 Juli 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Ageung Putri Aprilia

E-mail: ageungputri994@gmail.com

Abstrak

Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kota Serang adalah masalah sosial yang rumit dan belum tertangani dengan baik, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah. Penyebab dari kondisi GEPENG ini berasal dari faktor internal seperti ketidakaktifan, eksploitasi anak oleh orang tua, serta faktor eksternal yang meliputi kemiskinan serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam menangani fenomena GEPENG yang menjadi masalah sosial yang kompleks di wilayah Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengumpulkan data literatur seperti jurnal, artikel, dan buku yang relevan, serta menganalisisnya dengan teknik analisis untuk memperoleh gambaran yang terstruktur, untuk mengevaluasi peran Dinas Sosial Kota Serang dalam mengatasi GEPENG. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai upaya rehabilitasi sosial dan peraturan seperti Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, pelaksanaannya masih belum optimal karena terbatasnya fasilitas, tenaga kerja, dan dukungan dari keluarga. Rekomendasi yang diberikan mencakup pembangunan tempat rehabilitasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, penguatan kapasitas keluarga, dan kemitraan dengan organisasi sosial agar GEPENG bisa menjalani hidup yang mandiri dan layak tanpa harus meminta-minta.

Kata kunci - gelandang, pengemis, masalah sosial, kemiskinan, dinas sosial.

Abstract

The presence of homeless and beggars (GEPENG) in Serang City is a complex social issue that has yet to be properly addressed, requiring greater attention from the local government. The causes of this condition stem from internal factors such as lack of initiative and child exploitation by parents, as well as external factors including poverty and limited access to education and employment. This study aims to analyze the role of the Social Service in dealing with the GEPENG phenomenon which is a complex social problem in the Serang City area. This study uses a qualitative method with a literature study approach, collecting literature data such as journals, articles, and relevant books, and analyzing them with analysis techniques to obtain a structured picture, to evaluate the role of the Serang City Social Service in overcoming GEPENG. Findings indicate that although various social rehabilitation efforts and regulations, such as Regional Regulation No. 2 of 2010, have been implemented, their execution remains suboptimal due to limited facilities, human resources, and family support. Recommendations include establishing dedicated rehabilitation centers, strengthening inter-agency collaboration, enhancing family capacity, and building partnerships with social organizations to help GEPENG live independently and decently without resorting to begging.

Keywords - homeless, beggars, social issues, poverty, social services.

How To Cite : Aprilia , A. P., Rahmawati, H., & Maulana, J. (2025). Analisis Peran Dinas Sosial Terkait Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang . *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(2), 209–214. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i2.477>
Copyright ©2025 Ageung Putri Aprilia , Hilda Rahmawati, Jaka Maulana

PENDAHULUAN

Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini berada di bagian barat laut Provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang disebelah Selatan, Barat, Timur dan Laut Jawa di sebelah Utara yang memiliki permasalahan-permasalahan yang kompleks, salah satunya permasalahan Gelandangan dan Pengemis yang permasalahannya belum bisa dituntaskan dan menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah.

Istilah “Gepeng” merupakan singkatan dari gelandangan dan pengemis. Berdasarkan penjelasan dari Departemen Sosial R.I (1992), gelandangan ialah individu yang menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan standar kehidupan yang baik di masyarakat sekitar serta tidak memiliki rumah dan pekerjaan tetap di suatu daerah, mereka tinggal secara berpindah-pindah di tempat umum. Menurut Ali dkk dalam jurnal (Iqbali, 2021) mendefinisikan arti dari gelandangan, gelandangan yaitu berasal dari gelandang yang artinya hidup mereka selalu berkelan dan berpindah-pindah tempat yang tidak jelas. Selain itu, gelandangan ialah stratifikasi sosial, ekonomi menengah kebawah dalam pengelompokkan masyarakat di perkotaan. Gelandangan merupakan salah satu kelompok yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga membuat mereka berpindah-pindah tempat serta makan-minum dan tidur di sembarang tempat seperti, di depan ruko, di pinggir jalan, dls. Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) merupakan suatu fenomena sosial yang perlu dihadapi dengan serius. Fenomena masyarakat pengemis di Indonesia ini semakin meluas, dengan berbagai metode pengemis yang diterapkan dan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Mereka mulai berpura-pura cacat mulai dari, pura-pura lumpuh, pura-pura buntung, pura-pura buta, sampai mengeksploitasi bayi atau anak kecil untuk mendapatkan uang atau atensi dari publik. Umumnya di negara Indonesia, berbagai usia tidak hanya lansia yang terlibat sebagai pengemis, tetapi juga anak-anak dibawah usia 18 tahun, baik atas keinginan sendiri maupun karena pengaruh dari orang lain (Iqbali, 2021). Tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk dilakukan penanganan yang intensif karena merupakan masalah sosial, pemerintah daerah perlu menangani dan memberdayakan gelandangan dan pengemis kepada dinas sosial dan dibantu oleh satpol PP.

Dinas sosial adalah bagian pelaksana dari pemerintah daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk kesejahteraan sosial, membantu presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara di sektor sosial. Permasalahan yang berkaitan dengan situasi dan keteraturan sosial, terutama bagi tuna sosial seperti pengemis ini, muncul akibat minimnya fasilitas pembinaan dan kondisi lingkungan. Adanya peran lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam menangani fenomena ini, karena tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan pelayanan serta mengimplementasikan program kebijakan yang dibuat, terutama melalui Dinas Sosial. Menurut pasal 148 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam jurnal (Syamsuddin, 2020) yang isinya Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan ketentraman masyarakat yang dikepalai oleh kepala daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

- a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis dengan pendekatan pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, dan pemulangan. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab membantu mereka agar bisa hidup mandiri. Peraturan ini menekankan penanganan manusia tidak hanya penertiban semata.

- b) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 1 tentang kesejahteraan sosial, menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- c) (Mega Prastiwi & Ulfatun Najicha, 2022) Menyatakan bahwa situasi di Surakarta, di mana penertiban terhadap gelandangan dan pengemis masih bersifat normatif. Mereka menemukan bahwa adanya regulasi saja tidak cukup, sebab minimnya fasilitas seperti rumah singgah dan lemahnya koordinasi antar lembaga menghambat efektifitas penanganan. Lebih lanjut, pendekatan penegakan hukum mereka nilai tidak menyentuh aspek pembinaan yang dibutuhkan oleh kelompok ini.
- d) (Handayani et al., 2025) Melakukan studi di Kota Bandung dan menyoroti Dinas Sosial setempat yang masih kesulitan mengendalikan jumlah gelandangan dan pengemis terutama anak jalanan. Mereka mencatat bahwa kendala serupa muncul: SDM terbatas, kurangnya program pelatihan rutin, dan pengawasan yang lemah, yang memengaruhi keberlanjutan dan efektifitas pembinaan sosial.

Dinas Sosial

Dinas Sosial ialah komponen pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di pimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melakukan tugas pembantuan di bidang sosial. Fungsi Dinas Sosial termasuk perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup di tempat umum. Gelandangan juga menjadi pilihan bagi orang-orang yang tidak ada keinginan untuk mengubah nasibnya atau hidup dengan layak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin bagi mereka, memilih hidup menjadi gelandangan adalah pilihan yang baik padahal sebenarnya mereka masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

Pengemis

Pengemis merupakan praktik untuk diberikan bantuan serta mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Tidak sedikit di kota-kota besar banyak pengemis, hal tersebut mengganggu lingkungan masyarakat yang jika diberi terus-menerus membuat mereka semakin malas untuk mengubah nasibnya karena mereka sudah menanamkan bahwa menjadi pengemis adalah suatu pilihan yang tepat.

METODE

Pada penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dari hasil penelitian terdahulu sehingga memperoleh landasan teori terhadap masalah yang diteliti. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data yang berfokus pada analisis teori-teori, konsep-konsep, dan data-data berupa literatur buku, artikel pustaka, serta jurnal (Mirzakon, Abdi & Purwoko, 2005). Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis isi (Content Analysis), menurut Fraenkel & Wallen (2007) dalam (Mirzakon, Abdi & Purwoko, 2005) bahwa analisis isi adalah suatu alat yang berfokus pada penyajian konsep untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan

pandangan yang terstruktur dan jelas mengenai peran dinas sosial terkait gelandangan dan pengemis di Kota Serang.

PEMBAHASAN

Menurut para ahli sosial terdahulu, ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan, tidak ada keinginan untuk merubah nasib, memilih untuk meminta-minta dan menganggap bahwa kemiskinan untuk adalah sebuah takdir, sehingga mereka mempertahankan hidupnya menjadi gelandangan dan pengemis. Tidak sedikit masalah sosial yang terjadi tidak dapat dihindari di daerah perkotaan, karena mereka hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti melihat GEPENG terlibat dalam masalah sosial yang tidak pernah terselesaikan seperti masalah kemiskinan, kurangnya akan kesadaran pendidikan, dan tidak memiliki keterampilan kerja. Akibat dari masalah sosial tersebut, beberapa orang dikelas bawah memilih takdir hidupnya sebagai GEPENG. Kehidupan masyarakat terganggu oleh keberadaan orang-orang seperti gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki tempat tinggal. Keberadaan orang-orang tersebut menyebabkan masalah lingkungan dan masalah lingkungan sosial lainnya. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk melakukan upaya dalam menata keberadaan GEPENG. (Urbaningrum et al., 2022)

Pusat-pusat perbelanjaan, pinggir jalan, dan lampu merah adalah beberapa tempat dimana pengemis dapat ditemukan di Kota Serang. Dipinggir jalan raya Cijawa Kota Serang, di sekitar pasar rau, lampu merah parung serta di pelataran jalan depan SMKN 2 Kota Serang banyak GEPENG yang tinggal di dalam gerobak dan emperan toko atau ruko dengan beralaskan hanya kardus atau karung saja. Hal ini menunjukkan bahwa para GEPENG ini juga tidak memiliki rumah. Kebanyakan penyebab gelandangan dan pengemis adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal berpengaruh dari dalam diri pribadi pemohon, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan keadaan diluar yang bersangkutan. Ini terjadi karena pengaruh kondisi dalam diri dan lingkungan. Menurut (Irawan Dwi, 2013) terdapat berbagai alasan mengapa orang memilih untuk menjadi gelandangan dan pengemis antara lain :

1. Malas Berusaha

Suatu kebiasaan atau perilaku yang meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha apapun, kebanyakan dari masyarakat tidak ada keinginan untuk berusaha dan hanya ingin enaknya saja.

2. Ikut-ikutan Saja

Dengan kehadiran GEPENG yang tidak sedikit, dapat memunculkan pendatang baru dengan didukung bahwa menjadi GEPENG itu hal yang mudah untuk mendapatkan uang yang akhirnya membuat mereka mengikuti jejak orang-orang yang sudah lebih dahulu memilih menjadi GEPENG.

3. Disuruh Orang Tua

Kebanyakan yang menjadi GEPENG dengan alasan disuruh orang tua merupakan anak-anak yang memang diperintahkan dan tidak berani menolak suruhan orang tuanya dan fenomena ini terjadi eksploitasi anak.

4. Kemiskinan dan Terlilit Masalah Ekonomi Yang Akut

GEPENG adalah orang miskin yang tidak berdaya menghadapi masalah ekonomi yang terus menerus sehingga memilih menjadi gelandangan dan pengemis untuk bertahan hidup.

5. Mengemis daripada Menganggur

Sebagian orang berpendapat bahwa mengemis dan menjadi gelandangan lebih baik daripada menganggur, karena kondisi kehidupan yang sulit dan didukung oleh kesulitan mencari pekerjaan.

Pada dasarnya, seseorang dapat menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal

yang layak akibat kemiskinan dan memaksa mereka untuk mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu, kemiskinan menyebabkan kepadatan yang kurang terlindungi dan yang menyebabkannya kemungkinan adalah anak-anak dari keluarga miskin menjadi anak jalanan. Tidak dapat disangkal bahwa dari semua faktor penyebab menjadi GEPENG yang telah dijelaskan diatas, kemiskinan merupakan hal yang paling krusial dalam menyebabkan lahirnya gelandangan dan pengemis. (Irawan Dwi, 2013)

Kepala Dinsos Kota Serang Bapak M. Ibra Gholibi sudah membuat peraturan dengan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) yaitu dengan menghimbau masyarakat dan pengendara untuk tidak memberi uang kepada gelandangan dan pengemis (GEPENG), dan Anak Jalanan (ANJAL) yang selalu berkeliaran di lampu merah atau di pelataran jalan. Langkah tersebut bertujuan agar mampu mengurangi jumlah peminta-minta di jalanan yang bisa membahayakan diri mereka sendiri atau masyarakat pengguna jalan lain. Himbauan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berperan aktif untuk menekan angka GEPENG dan ANJAL baru yang nantinya bisa saja menjadikan aktivitas mengemis sebagai profesi tetap. (Muhilmi, 2025)

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang pencegahan pemberatasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Pengemis merupakan salah satu jenis penyakitnya dan peraturan tersebut berisikan pemerintah Kota Serang melarang untuk siapa pun memberi uang kepada pengemis. Peraturan nya pada Pasal 9 Ayat 1, 2, dan 3 yaitu:

1. Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis.
2. Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis.
3. Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis. (Putra, 2018)

Namun, di sisi lain fenomena GEPENG masih terlihat dibeberapa lokasi di Kota Serang misalnya, dilampu merah. Ada 2 kendala dalam menangani GEPENG di Kota Serang :

1. Infrastruktur

Setiap kebijakan perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk dapat di implementasikan dengan baik. Hal yang sama berlaku dalam penanganan GEPENG yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang. Fasilitas di Dinas Sosial tersebut masih sangat terbatas dan harus bergantung pada sarana milik pemerintah Provinsi Banten, seperti panti dan rumah rehabilitas. Saat ini, Dinas Sosial Kota Serang belum memiliki panti dan rumah rehabilitas untuk GEPENG sehingga dukungan yang diberikan untuk pembinaan kepada GEPENG yang telah ditertibkan tidak dapat berjalan secara maksimal.

2. Pembinaan Oleh Keluarga

Berdasarkan fakta-fakta dalam penelitian, terungkap bahwa peran keluarga yang seharusnya bertanggung jawab atas anak dan anggota keluarganya justru cenderung membiarkan dan bahkan mendorong anak-anak nya untuk mengemis dan menjadi gelandangan di jalan.

Dinas Sosial Kota Serang sudah mengimplementasikan program rehabilitas sosial bagi GEPENG yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang pencegahan, pemberatasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Namun, implementasi program ini belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai. (Firdaus, 2018)

Salah satu cara yang paling efektif untuk menangani GEPENG adalah melalui rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Dengan rehabilitasi ini bertujuan untuk mengawasi, membina, dan mengarahkan mereka betapa pentingnya dalam berusaha dan berwirausaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Harapan dari rehabilitasi ini, GEPENG menjadi kuat dan tidak lemah artinya mereka ada keinginan untuk bertahan hidup dengan kehidupan yang layak tanpa harus meminta-minta. Orang-orang seperti mereka yang tidak memiliki tempat tinggal dapat memahami bahwa pentingnya berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan adanya rehabilitasi juga GEPENG mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mereka

melanjutkan hidup yang lebih layak. (Hamidah, 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, fenomena gelandangan dan pengemis (GEPENG) di Kota Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial baik internal seperti kemalasan, kurangnya motivasi untuk mengubah nasib dan eksploitasi anak oleh orang tua, maupun eksternal seperti kemiskinan, kesulitan ekonomi dan minimnya akses terhadap pendidikan serta keterampilan kerja. Kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong seseorang menjadi GEPENG, yang tidak hanya menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal yang layak tetapi juga memicu masalah sosial dan lingkungan di perkotaan seperti di pusat perbelanjaan, pinggir jalan, dan lampu merah.

Rehabilitasi sosial menjadi solusi yang dianggap efektif untuk membina GEPENG agar memiliki motivasi, keterampilan, dan kesadaran untuk hidup mandiri tanpa mengemis. Program ini diharapkan dapat memberikan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan wawasan kewirausahaan. Dari program tersebut GEPENG mampu menjalani kehidupan yang lebih layak. Untuk mengoptimalkan penanganan GEPENG, diperlukan peningkatan sarana prasarana, anggaran, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam mendukung upaya rehabilitasi dan pencegahan munculnya GEPENG baru.

Untuk menyelesaikan permasalahan GEPENG di Kota Serang, pemerintah harus secepatnya mendirikan fasilitas sendiri seperti rumah rehabilitasi sehingga proses pembinaan tidak perlu mengandalkan provinsi. Di samping itu, dukungan keluarga perlu ditingkatkan melalui Pendidikan dan bantuan social untuk mencegah anak atau anggota keluarga turun ke jalan. Dinas Sosial juga dapat berkolaborasi dengan LSM atau organisasi lainnya untuk mendukung proses pembinaan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan agar GEPENG yang telah dibina tidak kembali ke jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, W. (2018). Analisis Kritis Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan Pengemis (Gepeng) oleh Dinas Sosial Kota Serang (PerDa Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat). *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*, 1(12).
- Hamidah, S. N. (2019). Penanggulangan Gelandangan Pengemis (GePeng) di Kota Serang Banten dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Lembaran Masyarakat*, 5(1), 55–76.
- Handayani, A., Fauzi, L., & Rohayatin, T. (2025). *Peran Dinas Sosial Dalam Menaggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kota Bandung*. 02(01).
- Iqbali, S. (2021). Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. *Jurnal Harian Regional*.
- Irawan Dwi, Di. (2013). *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis* (Vol. 01, Issue 2, p. 20). Titik Media Publisher.
- Mega Prastiwi, A., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Agustin Mega Prastiwi, dkk. : Peran Dinas Sosial dalam Penertiban... Peran Dinas Sosial dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Surakarta. *Jurnal Discretie*, 3(2), 73–84.
- Mirzakon, Abdi & Purwoko, B. (2005). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Universitas Negeri Surabaya*, 10.
- Muhilmi, N. (2025). *Dinsos Kota Serang Himbau Warga Tak Beri UANG ke Pengemis dan Anak Jalanan*. Radarbanten.
- Putra, S. A. (2018). *Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang Skripsi*.
- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima(Pkl)Di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1), 1–19.
- Urbaningrum, N., Syahri, M., & Tinus, A. (2022). Peran Pemerintah Kota Palu dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1), 41–51.